

**PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG
DALAM PEMBINAAN INDUSTRI KECIL
MENENGAH (IKM) DI PROVINSI LAMPUNG
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Adi Vivaldy
NPM. 1851010118**



Program Studi: Ekonomi Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444H/2023 M**

**PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG
DALAM PEMBINAAN INDUSTRI KECIL
MENENGAH (IKM) DI PROVINSI LAMPUNG
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Ditujukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi S1
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh :
Adi Vivaldy
NPM : 1851010118

Program Studi: Ekonomi Syariah

Pembimbing I: Dr. Madnasir, S.E., M.S.I.
Pembimbing II: Dedi Satriawan, M.Pd.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Vivaldy
Npm : 1851010118
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMBINAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DI PROVINSI LAMPUNG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung 08 Juni 2023





**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMBINAAN INDUSTRI
KECIL MENENGAH (IKM) DI PROVINSI LAMPUNG
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"

Nama : Adi Vivaldy

NPM : 1851010118

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan disertakan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Madnasir, S.J., M.S.I.

NIP. 197504242002121001

Pembimbing II

Dedi Satriawan, M.Pd.

NIP. 2016010219891218117

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Erike Angraeni, M.E.Sy.

NIP. 19208082011012009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Peranan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Lampung Dalam Pembinaan Terhadap (IKM) Industri Kecil Menengah Di Provinsi Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam” disusun oleh Adi Vivaldy, NPM 1851010118 Program Studi Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal: Jum’at, 16 Juni 2023.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Dr. Hanif, S.E., M.M

Sekretaris : Nanda Audia, M.M.

Penguji I : Vicky F. Sanjaya, M.Sc.

Penguji II : Dedi Satriawan, M.Pd.

.....
.....
.....
.....



Mengetahui,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Lulus Satrianto, S.E., M.M, Akt. CA
ID No. 009262008011008

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam melakukan pembinaan terhadap Industri Kecil Menengah (IKM) termasuk dalam mempromosikan produk industri kecil menengah di Provinsi Lampung. IKM di Provinsi Lampung tidak bisa bertahan lama apabila tidak dibantu oleh pemerintah, karena sebagian besar usaha IKM menghasilkan barang-barang konsumsi yang tidak mampu bertahan lama dan mereka mempunyai keterbatasan sumber daya dimana produknya tidak bisa menjangkau segmen pasar lebih luas. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengungkap fenomena yang terjadi diobjek penelitian terutama mengenai peranan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Lampung dan IKM Provinsi Lampung dalam pembinaan industri kecil menengah. Kemudian dapat diketahui pula faktor-faktor yang menghambat terhadap pembinaan industri kecil yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan kondisi yang terjadi secara benar, nyata, jelas dan langsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam mempromosikan produk IKM di Provinsi Lampung. (2) Kendala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam mempromosikan produk IKM. (3) Upaya dalam mempromosikan produk IKM di Provinsi Lampung berupa pembinaan-pembinaan yang dapat berupa pelatihan, pendidikan, maupun kebijakan lain untuk meningkatkan kualitas produk IKM itu sendiri serta mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Kata Kunci : Peran, Dinas Perindustrian Perdagangan, Promosi, IKM, Provinsi Lampung

ABSTRACT

This research was conducted to determine the extent of the role of the Lampung Provincial Industry and Trade Office in providing guidance to Small and Medium Industries (IKM), including in promoting small and medium industrial products in Lampung Province. SMEs in Lampung Province cannot last long if they are not assisted by the government, because most SMEs produce consumer goods that cannot last long and they have limited resources where their products cannot reach a wider market segment. Through this research, it is hoped that it can reveal the phenomena that occur in the research object, especially regarding the role played by the Lampung Provincial Industry and Trade Service and Lampung Province IKM in fostering small and medium industries. Then it can also be known the factors that hinder the development of small industries carried out by the Department of Industry and Trade of Lampung Province.

This research is a qualitative descriptive research. Data collection techniques using interviews and documentation. The data analysis method used in this research is descriptive qualitative analysis, namely describing or describing the conditions that occur correctly, clearly, clearly and directly.

The results of the study show that (1) The role of the Industry and Trade Office of Lampung Province in promoting IKM products in Lampung Province. (2) Obstacles to the Industry and Trade Office of Lampung Province in promoting IKM products. (3) Efforts to promote IKM products in Lampung Province are in the form of coaching which can be in the form of training, education, or other policies to improve the quality of the IKM products themselves and overcome the problems they face.

Keywords: Role, Trade Industry Service, Promotion, IKM, Lampung Province

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ
اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (Q.S Ar-Ra'd Ayat 11).

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾

Artinya : “Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" Maka terjadilah ia”. (Q.S Yassin Ayat 82).

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada:

1. Yang saya sayangi, kedua orang tua saya, Bapak Syarif dan Ibu Ema yang menjadi alasan saya semangat menjalani kehidupan yang fana ini, yang selalu memberikan saya semangat dan motivasi dalam kehidupan ini. Terimakasih yang tak terhingga saya ucapkan untuk kalian yang telah memberikan banyak pengorbanan, baik waktu maupun materi, karena kalian adalah alasan utama bagi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih pula atas doa-doa indah yang selalu kalian panjatkan untuk saya.
2. Untuk adik saya Farrel Shendra Al-Faiz yang saya sayangi, yang selalu sabar, tabah dalam menemani dan menyemangati dalam penyelesaian skripsi ini..
3. Almamater saya tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Adi Vivaldy, Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 31 Maret 2000, putra pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Syarif dan Ibu Ema. Riwayat penulis sebagai berikut:

1. Pendidikan taman kanak-kanak di TK Kartika II-26 BANDAR LAMPUNG yang diselesaikan pada tahun 2006.
2. Pendidikan Sekolah Dasar ditempuh di SD Negeri 2 PALAPA, Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012.
3. Melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 23 Bandar Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2015.
4. Pada tahun 2015 melanjutkan ke SMA Negeri 3 Bandar Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2018.
5. Kemudian pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Raden Intan Lampung pada prodi Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan pengikut-Nya yang taat pada ajaran agama-Nya, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang pada saat ini.

Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan dalam menyelesaikan studi pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). terselesaikannya skripsi ini berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu dengan kerendahan dan ketulusan hari penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini. Secara rinci penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A selaku Ketua Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah menyetujui judul skripsi sehingga terpilihlah judul ini.
3. Bapak Dr. Madnasir. S.E., M.Si. selaku pembimbing akademik satu yang telah bersedia dalam memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dedi Satriawan, M.Pd. selaku pembimbing akademik dua yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis.
5. Para Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dan Para Pelaku IKM yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian sehingga terselesaikannya skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membagi ilmu, membantu serta memberikan masukan-masukan yang InsyaAllah dapat menjadi pedoman dan bekal bagi penulis.
7. Perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak menyediakan materi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Untuk seluruh keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah khususnya kelas B, yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Serta semua pihak yang memberikan bantuan moril maupun mental dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekeliruan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu saran-saran pemikiran dari semua pihak sangat diharapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT berkenan membalas dan meridhoi amal baik atas jasa yang telah diberikan kepada penulis, Aamiin.

Bandar Lampung, 19 Juli
2023

Penulis

Adi Vivaldy
NPM.1851010118

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookma
PERSETUJUAN.....	Error! Bookma
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	i
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Manfaat Penelitian.....	9
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
I. Metode Penelitian.....	14
J. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
A. Teori tentang Industri Kecil Menengah (IKM)	20
B. Perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Indonesia	22
C. Bentuk dan Jenis-Jenis Industri	24
E. Pemerintahan	28
F. Peran Pemerintahan	30
G. Peran Pemerintah dalam Islam.....	33

1. Dasar Hukum Ekonomi Islam	40
2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.....	42
3. Tujuan Ekonomi Islam	48
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	54
A. Sejarah Singkat Tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	54
B. Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.....	54
C. Struktur Organisasi	58
D. Uraian Tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.....	62
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	68
A. Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pembinaan Industri Kecil Menengah.....	68
1. Peranan Perindustrian.....	68
2. Pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM)	69
B. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung (DISPERINDAG) dalam Mempromosikan Produk IKM di Provinsi Lampung.....	86
1. Pelaku IKM belum optimal menggunakan teknologi dalam memasarkan produknya.....	86
2. Seringnya pelaku IKM tidak mengikuti pelatihan yang diadakan	87
3. Kurangnya tenaga fungsional, sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan penyuluhan dan pembinaan IKM.....	87
C. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM).....	91
BAB V PENUTUP.....	96
A. Simpulan.....	96
B. Rekomendasi	97
DAFTAR RUJUKAN.....	99
LAMPIRAN.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Data Pendidikan PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.....	59
Tabel 3.2	Data Pegawai Non PNS berdasarkan pendidikan.....	60
Tabel 4.1	Data promosi yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dari tahun 2018 sampai 2022.....	71
Tabel 4.2	Data program pembinaan dan pelatihan untuk membantu promosi produk IKM di provinsi Lampung yang sudah dibuat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi Lampung pada tahun 2022.....	75
Tabel 4.3	Penetapan Penerimaan Bantuan Sosial, Berupa Barang yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat di Provinsi Lampung Pada Tahun 2022.....	81
Tabel 4.4	Data banyaknya Kelompok Usaha dan Jumlah Unit Usaha Di Provinsi Lampung Tahun 2022 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.....	86

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1** Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Lampung57
- Gambar 3.2** Rekapitulasi Data PNS Berdasarkan Golongan Ruang ..58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Untuk pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	106
Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian	107



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Langkah pertama sebelum peneliti menjelaskan lebih lanjut pokok pembahasan terkait penelitian, akan diuraikan terkait istilah yang terdapat dalam proposal skripsi ini guna menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan bagi pembaca. Dengan demikian, perlu dilakukan pembatasan makna kalimat dengan harapan mendapatkan penjelasan tentang arti dan makna yang dimaksud. Penelitian yang penulis lakukan mengenai tentang IKM (Industri Kecil Menengah), adapun definisi mengenai IKM, yaitu Industri Kecil Menengah adalah sub sektor yang mengelola jenis-jenis industri yang berskala kecil atau menengah seperti industri rumah tangga, dan industri skala kecil lainnya yang lebih mudah untuk dibentuk oleh masyarakat terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah. IKM mampu memproduksi produk-produk berkualitas dan bernilai jual tinggi sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat lokal maupun internasional. IKM kerajinan yang bernilai jual tinggi mempunyai ciri khas dalam proses produksinya.¹ Dengan demikian skripsi ini berjudul, **“PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMBINAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DI PROVINSI LAMPUNG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**.

Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis studi tentang peristiwa (tindakan, esai, dll.) Untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya (asal, penyebab, penyebab sebenarnya, dll.).²

¹Ayu Wulandari, “Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Menengah (Ikm) Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 4, no. 1 (2021): 483–490.

²B A B Ii and Landasan Teori, “Jbptunikompp-Gdl-Mohhabibin-28322-4-Unikom_M-I” (2002): 9–22.

2. Peran

Peran adalah penilaian sejauh mana suatu fungsi lembaga berpartisipasi dalam mendukung upaya pencapaian tujuan atau ukuran yang telah ditetapkan dengan melibatkan hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab-akibat.³

3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung (DISPERINDAG)

Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung No. 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung bergabung menjadi Dinas Perindustrian Provinsi Lampung. Kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

B. Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan diberbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Ramainya pembicaraan masalah ini disebabkan, salah satu tolok ukur kemajuan suatu negara adalah dari kemajuan ekonominya dan tulang punggung dari kemajuan ekonomi adalah dunia bisnis.⁵ Perusahaan yang bergerak dalam dunia bisnis terdiri dari beragam perusahaan dan

³B A B Ii and A Peran, "Organization and Management," *Handbook of Educational Ideas and Practices* (2015): 377–518.

⁴"Tentang Kami - Dinas Perindag Provinsi Lampung," accessed November 21, 2022, <https://disperindag.lampungprov.go.id/pages/tentang-kami>.

⁵"RESENSI BUKU 'BANK DAN LEMBAGA KEUNGAN LAINNYA' – KISAH DARI BALIK LENSA," accessed January 10, 2023, <https://hakikatkebahagiaan.wordpress.com/2013/07/06/resensi-buku-bank-dan-lembaga-keungan-lainnya/>.

bergerak dalam berbagai bidang usaha, mulai dari usaha perdagangan, industri, pertanian, manufaktur, peternakan, perumahan, keuangan dan usaha-usaha lainnya.⁶

Menurut ilmu ekonomi Islam, negara mempunyai peran penting dalam perekonomian. Negara memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dengan syarat bahwa tugas itu dilaksanakan dengan cara demokratis dan adil, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya, dimana segala keputusan diambil sesudah bermusyawarah secukupnya dengan wakil-wakil rakyat yang sebenarnya.⁷

Tokoh ekonomi Islam di antaranya adalah Abu Yusuf ialah seorang tokoh ekonomi di bidang keuangan umum dengan menghasilkan gagasan tentang peranan negara, pekerjaan umum dan perkembangan pertanian yang masih berlaku hingga sekarang. Ketika berbicara tentang pengadaan fasilitas infrastruktur, Abu Yusuf menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhinya agar dapat meningkatkan produktivitas tanah, kemakmuran rakyat serta pertumbuhan ekonomi.⁸ Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an surat Az Zumar ayat 27 :

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya telah Kami buat bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran.*” (Q.S. Az-Zumar: 27).

Berdasarkan pra riset yang dilakukan penulis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung merupakan sebuah

⁶“Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya - Ardiansyah Putra Hrp, S.Pd., M.Si., Dwi Saraswati, S.Pd., M.Si. - Google Buku,” accessed January 10, 2023, <https://books.google.co.id/books?ide>.

⁷“Peranan Negara Dalam Perekonomian (Perspektif Islam) -Part 1-,” accessed January 10, 2023, <https://www.iaei-pusat.org/article/ekonomi-syariah/peranan-negara-dalam-perekonomian-perspektif-islam-part-1-1?language=id>.

⁸“Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam - Gramedia Literasi,” accessed January 10, 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-pemikiran-ekonomi-islam/>.

lembaga yang mempunyai peran penting dalam membangun ekonomi masyarakat. Seperti menyalurkan bantuan berupa alat produksi, memberikan pengawasan, pembinaan, dan memberikan penghargaan di setiap usaha yang sedang berjalan diantaranya IKM (Industri Kecil Menengah).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah dalam bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi urusan rumah tangga daerah, dan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum Pemerintahan dan membangun bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.

Situasi ekonomi Indonesia saat ini masih tertinggal dari Negara tetangga. Bahkan saat ini, Indonesia disebut sebagai Negara berkembang daripada Negara industri. Hal ini terlihat dari tingginya angka pengangguran di Indonesia dan rendahnya kesejahteraan rakyatnya. Untuk mengatasinya, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang dapat menciptakan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja ini biasanya dilakukan melalui pembukaan usaha industri. Industri yang diciptakan tidak harus besar, tetapi bisa kecil atau menengah. Sekarang usaha kecil-kecilan ini merupakan usaha yang sangat menjanjikan. Karena banyak orang yang sukses karena usaha kecil-kecilan dan usaha menengah.

Industri kecil menengah biasanya lebih diminati karena tidak membutuhkan modal besar dan tidak memiliki banyak pesaing. dan lebih mudah dan lebih mudah untuk menjalankan usaha industri kecil dan menengah. IKM (Industri Kecil Menengah) merupakan salah satu pilar perekonomian negara. IKM (Industri Kecil Menengah) merupakan sumber pendapatan negara melalui pajak yang dibayar oleh negara. Tidak hanya negara, industri kecil dan menengah juga

berperan dalam menyerap tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran. Selain untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.⁹

Saat ini dengan bertambahnya jumlah industri kecil menengah (IKM) di Provinsi Lampung. Namun, industri kecil menengah masih menghadapi beberapa kendala dalam menjalankan aktivitasnya. Kendala yang dihadapi industri kecil menengah di Provinsi Lampung dimulai dari (1) Industri Kecil Menengah (IKM) masih memiliki modal rendah, (2) pengetahuan IKM masih rendah dalam mengembangkan dunia bisnis, (3) ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh pelaku IKM masih rendah, (4) IKM masih mengalami kendala lingkungan eksternal (eksternal) seperti kurangnya listrik, (5) IKM masih belum dapat memahami strategi dan proses pemasaran untuk hasilnya. produksi, (6) kurangnya pemahaman tentang mekanisme birokrasi di dunia bisnis, (7) kemampuan untuk mengoperasionalkan teknologi yang masih rendah, dan (8) kemampuan IKM untuk mengakses informasi masih terbatas. Hal ini dapat menjadi penghambat pengembangan usaha kecil dan menengah di Provinsi Lampung menyebabkan turunya perkembangan industri kecil menengah di kawasan Provinsi Lampung. Pada dasarnya perkembangan IKM (Industri Kecil Menengah) menjadi salah satu sektor yang memiliki peran guna mendorong perekonomian daerah. Selain itu IKM juga berperan penting dalam hal produksi dan pendistribusian produk-produk yang dihasilkan kepada masyarakat dan juga dalam hal penyerapan tenaga kerja. IKM menjadi sektor yang cukup tangguh dalam menghadapi permasalahan ekonomi daerah, maka dari itu pemerintah setempat setidaknya memiliki perhatian lebih pada perkembangan sektor IKM.¹⁰

⁹Wiwiek Rabiatul Adawiyah, "Faktor Penghambat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Studi Di Kabupaten Banyumas," *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* 2, no. 2 (2014): 165.

¹⁰Bulan April, "INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERFASILITASI KONSU Bandar Lampung , 30 April 2022 Kepala Seksi Desain Dan Kemasan Koordinator Rumah Kemasan Media Lisna , S . Gz , M . Kes AN MERK INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) PROVINSI LAMPUNG Su," no. 1 (2022).

Mengatasi beberapa kendala yang dihadapi industri kecil menengah tersebut di atas, diperlukannya peran pemerintah. Dalam hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung berperan besar sebagai salah satu penggerak kecanggihan dan pengembangan industri kecil menengah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dibagi menjadi tiga bidang sesuai tugas dan fungsinya yaitu perindustrian, perdagangan dan pengawasan konsumen serta perlindungan konsumen. Bidang industri bertugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan bidang industri, dan bidang perdagangan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan bidang perdagangan, baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.

Seperti kita ketahui, peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam pembinaan IKM (Industri Kecil Menengah) yaitu, sebagai penyerap tenaga kerja, penghasil barang dengan tingkat harga yang terjangkau bagi kebutuhan masyarakat dan penghasil devisa negara yang potensial. Dengan industri kecil menengah yang kuat maka struktur ekonomi akan menjadi kokoh, yang berperan besar dalam peningkatan ekspor dan pengendalian impor, serta tumbuh dan berkembang pada basis kemampuan diri sendiri. Industri kecil menengah memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional terutama untuk penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja.

Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi kerakyatan harus mendapatkan pembinaan secara khusus serta bertahap agar terus berkembang dan mampu berperan secara efektif dan efisien dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran sehingga mampu berkontribusi besar pada perekonomian nasional. Pengembangan industri kecil Menengah di Provinsi Lampung dalam rangka pembangunan dilihat sebagai usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia.¹¹

¹¹Abdul Halim, "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (2020): 157–172, <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/39>.

Pesatnya perkembangan IKM (Industri Kecil Menengah) di masyarakat sejalan dengan peran DISPERINDAG sebagai lembaga pengawas sekaligus lembaga yang memfasilitasi IKM (industri kecil menengah). Berdasarkan apa yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan judul penulisan **“PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMBINAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DI PROVINSI LAMPUNG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tertera, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan untuk melakukan penelitian sebagai berikut:

- a. Tingginya angka pengangguran di Indonesia dan rendahnya kesejahteraan rakyatnya. Untuk mengatasinya, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang dapat menciptakan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja ini biasanya dilakukan melalui pembukaan usaha industri, salah satunya IKM (industri kecil menengah).¹²
- b. Saat ini terdapat usaha kecil dan menengah di Provinsi Lampung, dengan bertambahnya jumlah industri kecil menengah di Provinsi Lampung. Namun, industri kecil menengah masih menghadapi beberapa kendala dalam menjalankan aktivitasnya. Kendala yang dihadapi industri kecil menengah di Provinsi Lampung dimulai dari upaya peningkatan produktivitas dan kemampuan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya produktif lainnya secara maksimal.

2. Batasan masalah

¹²Bagas Rumantyo, “Analisis Peran Industri Kecil Dan Menengah Terhadap Pengentasan Pengangguran Terbuka Di Kota Malang” (2021).

Berdasarkan identifikasi masalah yang disebutkan, perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian ini dapat menghasilkan penelitian yang sempurna, maka penulis menerapkan adanya batasan dalam penelitian yang dilakukan, batasan dilakukan pada objek maupun tahun penelitian. Oleh karena itu, peneliti memfokuskan penelitian hanya berkaitan pada “Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Dalam Pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam.”

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah tersebut, agar peneliti ini dapat diteliti secara fokus dan mendalam maka peneliti perlu memfokuskan ruang lingkup pembahasan penelitian pada Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Dalam Pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi Lampung.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah maka perlu dirumuskan permasalahannya agar dapat memperjelas tujuan dari penelitian perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran dan upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi Lampung?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi Lampung?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung terhadap pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung terhadap pembinaan Industri kecil menengah (IKM) pangan di Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi Lampung.
3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam tentang peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung terhadap pembinaan industri kecil menengah (IKM) di Provinsi Lampung.

G. Manfaat Penelitian

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberikan manfaat dari penulis maupun pihak lain yang membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi bidang keilmuan ekonomi islam. untuk mengetahui bagaimana pembinaan terhadap industri kecil menengah (IKM) yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dan kaitannya terhadap perspektif ekonomi islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademis dan Masyarakat, sebagai tambahan informasi untuk memberikan wawasan pemikiran khususnya bagi pengembangan ilmu ekonomi tentang peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Dalam Pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi Lampung.

- b. Bagi penulis, sangat bermanfaat untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan dibidang industri kecil menengah dan juga untuk mendapatkan pengalaman sehingga dapat membandingkan teori yang didapat di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi di dunia perusahaan.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Yuni Anisa'ul Habibah tahun 2019 berjudul, "Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi Dalam Pemberdayaan Produk Industri Kecil Menengah (IKM) Batik Tulis di Desa Tampo Kecamatan Cluring". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi dalam Pemberdayaan Produk Industri Kecil Menengah Batik Tulis di salah satu IKM Di Desa Tampo Kecamatan Cluring, yaitu a) Memberikan binaan terhadap IKM baru, b) Melakukan pengembangan dan pengawasan terhadap IKM c) Memfasilitasi IKM, d) Mewujudkan perkembangan industri kecil menengah kearah yang lebih baik, secara sehat dan berhasil. Persamaan, sama-sama meneliti tentang bagaimana peran disperindag terhadap IKM dan menggunakan metode yang sama yaitu, deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya yaitu, penelitian ini hanya fokus meneliti IKM batik tulis yang berada di desa Tampo Kec. Cluring dan fokus pada pemberdayaan produk terhadap IKM tersebut.¹³
2. Arif Rahman Hi Abas tahun 2020 berjudul, "Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Suawesi Tengah Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) Rumah Coklat Kota Palu Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Isi penelitian ini menjelaskan bahwa 1) Proses pembinaan yang

¹³Program Studi et al., "KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PEMBERDAYAAN PRODUK INDUTRI KECIL MENENGAH (IKM) BATIK TULIS DI DESA TAMPO KECAMATAN CLURING.

dilakukan oleh Dinas perindustrian dan perdagangan Sulawesi Tengah dalam memberdayakan IKM Rumah Coklat Kota Palu adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan alat pengolahan coklat, penanaman modal, memberikan kesempatan untuk memamerkan hasil olahannya pada event-event lokal, nasional dan internasional. 2) Pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah pemerintah daerah membuka peluang besar dalam pengembangan pendapatan masyarakat terkhusus petani coklat hal ini berkaitan dengan konsep Ekonomi islam atau teori yang dikembangkan berdasarkan ajaran-ajaran islam. Persamaan pada penelitian ini yaitu, menggunakan metode yang sama yaitu, deskriptif kualitatif dan membahas tentang Disperindag terhadap IKM yang berlandaskan Ekonomi Islam. Adapun perbedaannya yaitu, di penelitian hanya fokus terhadap salah satu IKM saja dan terhadap pemberdayaan yang dilakukan oleh Disperindag.¹⁴

3. Siti Nurhayati tahun 2012 yang berjudul, “Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah di Kota Surakarta”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Peran DISPERINDAG dalam mengembangkan IKM di Surakarta adalah : a) Disperindag melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan industri dalam menyelenggarakan kerja sama yang saling menguntungkan, dan mengusahakan peningkatan serta pengembangan kerjasama tersebut. b) Mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. c) Disperindag memberikan binaan terhadap IKM baru. Misalnya: Pada Indutri konveksi dengan melakukan Perbaikan proses produksi, peningkatan standar produk yang di dihasilkan. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah, menggunakan

¹⁴ARIF RAHMAN HI ABAS tahun 2020 berjudul, “UPAYA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SULAWESI TENGAH DALAM PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) RUMAH COKLAT KOTA PALU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”.

metode yang sama yaitu, kualitatif dan membahas peran Disperindag terhadap IKM yang mencakup cukup luas di kota Surakarta. Perbedaannya, pada penelitian ini fokus terhadap pengembangan bukan pembinaan.¹⁵

4. Fajar Bahagia tahun 2017 berjudul, “Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar Dalam Meningkatkan Ekonomi Pengrajin Rencong di Gampong Baet”. Penelitian ini menjelaskan bahwa, peran dinas perindustrian dan perdagangan dalam meningkatkan ekonomi pengrajin rencong di Gampong Baet, maka pada bab terakhir ini penulis menarik beberapa kesimpulan : a) Rencong sebagai benda pusaka yang bernilai dalam masyarakat Aceh adalah suatu senjata tajam yang dipergunakan oleh seluruh masyarakat Aceh yang berdomisili di daerah Provinsi Aceh, maupun orang-orang Aceh yang sudah merantau ke daerah lain di Indonesia. Rencong juga merupakan sebuah alat pembela diri dari serangan musuh. Rencong Aceh merupakan senjata pusaka bagi rakyat Aceh dan merupakan simbol keberanian, keperkasaan, pertahanan diri, dan kepahlawanan Aceh dari abad ke abad. b) Pada kasus pengrajin rencong di Gampong Baet, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar terlihat bahwa secara keseluruhan aspek pengetahuan, sikap, dan ketrampilan pengrajin dalam melakukan kegiatan pemasaran secara mandiri masih rendah. c) Aspek kemandirian pemasaran yang lemah pada pengrajin terletak pada sikap, pengrajin belum tertarik melakukan promosi untuk memperkenalkan produknya pada jangkauan pasar yang lebih luas. Persamaan pada penelitian ini yaitu, metode penelitian ini menggunakan field research (penelitian lapangan) artinya peneliti melakukan penelitian secara langsung di lokasi, yaitu Disperindag dan di desa tempat para pengrajin rencong di Desa Baet, kecamatan Sukamakmur,

¹⁵SITINURHAYATI tahun 2012 yang berjudul, “PERANDINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGANDALAM PENGEMBANGANINDUSTRI KECIL MENENGAHDIKOTASURAKARTA”.

kabupaten Aceh Besar, provinsi Aceh. Adapun perbedaan diantaranya, pada penelitian ini terdapat metode yang sedikit berbeda dimana penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan hanya focus pada satu tempat yaitu tempat para pengrajin rencong di kabupaten Aceh Besar.¹⁶

5. Rizky Wahyudi tahun 2022 dengan penelitian yang berjudul, “Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah Kota Medan”. Hasil dari penelitian ini yaitu, Industri Kecil Menengah (IKM), memiliki tugas yang begitu penting bagi peningkatan perekonomian di masyarakat. Hal ini tentunya bisa meminimalisir jurang dengan dengan krisis ekonomi. Industri Kecil Menengah sendiri mampu menjadi tumpuan keberadaan ekonomi dari raktar kecil. Selain itu, tugas Industri Kecil Menengah juga sangat penting bagi masyarakat. Seperti sarana meratakan perkonomian rakyat kecil, dan sebagainya. Dari pengamatan yang penulis dapatkan, maka dapat penulis simpulkan beberapa tugas Dinas Perdagangan dan Perekonomian kota Medan ialah: melakukan pembinaan terhadap industri-industri dengan menyelenggarakan kerja sama yang menguntungkan. Mencegah adanya monopoli di kalangan industri, memberikan Menumbuhkan industri kecil dan menengah baru untuk mencapai pembangunan. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu, menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan data untuk jurnal ilmiah ini. Dimana penelitian ini sering digunakan dan dilakukan oleh peneliti lain yang memiliki fokus pada ilmu-ilmu sosial dan pendidikan, seringkali sangat bermanfaat. Beberapa alasan dikemukakan mengapa penelitian kualitatif ini meningkatkan hasil penelitian kualitatif.¹⁷

¹⁶fajar bahagia, “Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar Dalam Meningkatkan Ekonomi Pengrajin Rencong Di Gampong Baet” (2017): 1–62.

¹⁷Rizky Wahyudi, “Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah Kota Medan,” *SIBATIK JOURNAL*:

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi menggunakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Pendekatan kualitatif ini diambil karena dalam penelitian ini sasaran atau objek penelitian dibatasi agar data-data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin serta agar dalam penelitian ini tidak dimungkinkan adanya pelebaran objek penelitian. Penelitian dilakukan langsung dilapangan, rumusan masalah juga ditemukan di lapangan, kemungkinan data berubah-ubah sesuai data yang ada di lapangan, sehingga akan ditemukan sebuah teori baru di tengah lapangan. Penelitian ini bertolakdari cara berpikir induktif, kemudian berpikir secara deduktif, penelitian ini menganggap data adalah inspirasi teori. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi/kejadian sehingga data yang akan terkumpul bersifat deskriptif untuk mengidentifikasi lingkungan internal maupun eksternal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Dengan demikian, peneliti dapat mengetahui hal-hal yang terkait tentang peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung terhadap pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM). Dari teori-teori di atas dapat ditarik simpulan

bahwa penelitian deskriptif kualitatif menggunakan langkah-langkah penelitian dari pengamatan fenomena yang dapat dijelaskan secara terperinci dan ilmiah. Pengamatan ilmiah yang dimaksudkan adalah pengamatan yang dimulai dari hal-hal terkecil/sempit ke hal-hal lebih besar/luas atau dengan kata lain penelitian ini dari bentuk induktif ke bentuk deduktif.¹⁸

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dilihat dari sifat penelitian ini, penelitian ini bersifat deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan gambaran yang sistematis, deskriptif, faktual dan akurat tentang fakta, ciri dan hubungan antar fenomena yang diteliti.¹⁹

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Di Jl. Cut Mutia No.25, Gulak Galik, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35214. Alasan pemilihan lokasi diatas adalah :

- a. Karena IKM memiliki potensi besar terhadap ekonomi di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung, perlu adanya perhatian pemerintah terhadap IKM. Dan peran Disperindag Provinsi Lampung apakah sudah memfasilitasi terhadap pembinaan IKM.
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala, beserta tinjauan ekonomi islam terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam pembinaan Industri Kecil Menengah di Provinsi Lampung.

¹⁸B A B Iii, "Bab Iii Metode Penelitian," no. 64 (2002): 30–38.

¹⁹Tjutju Soendari, "Batasan" (n.d.).

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan suatu laporan pengamatan yang baik dan terarah maka diperlukan data yang lengkap dan relevan dengan persoalan yang dihadapi, sehingga dapat dipercaya kebenarannya. Sumber data yang digunakan dalam pengamatan ini, adalah:

Dalam pengamatan posisi sumber data manusia sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasi, sehingga kedudukan narasumber bukan sebagai responden melainkan sebagai informan. Cara mendapatkan informasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dapat diperoleh dengan:

- a. Mewawancarai beberapa narasumber, yaitu pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dan pemilik usaha industri kecil menengah (IKM) untuk memperoleh informasi mengenai data yang dibutuhkan.
- b. Mengkaji beberapa dokumen, arsip dan jurnal-jurnal terkait dengan Industri Kecil Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- c. Membaca, menelusuri serta menelaah buku pedoman dan buku-buku lainnya, sebagai referensi dan menggali teori-teori yang berkembang yang ada hubungannya dengan materi pengamatan, sehingga dapat dipercaya kebenarannya.

4. Teknik Pengumpulan data

Kecermatan dalam memilih dan menyusun serta mengumpulkan data sangat berpengaruh kepada objektivitas hasil penelitian. Penulis dalam usaha memperoleh data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan mengkaji dokumen dan arsip.

Teknik pengumpulan data dalam pengamatan ini meliputi:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan responden untuk memperoleh data penunjang yang relevan.²⁰

Wawancara yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam pengamatan ini, khususnya pada bagian Industri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

b. Mengkaji Dokumen dan Arsip

Untuk memperoleh data yang relevan penulis juga mempelajari dokumen-dokumen, arsip, dan juga jurnal-jurnal yang berkaitan tentang Pengembangan Industri Kecil Menengah yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

c. Metode Kepustakaan

Adalah suatu cara pengumpulan data dengan membaca, menelusuri serta menelaah buku pedoman dan buku-buku lainnya, sebagai referensi dan menggali teori-teori yang berkembang yang ada hubungannya dengan materi pengamatan, sehingga dapat dipercaya kebenarannya.

5. Teknik Analisis Data

Ada tiga unsur utama dalam proses analisis yang harus dipahami oleh peneliti kualitatif. Ketiga komponen tersebut terlibat dalam proses analisis, saling terkait, dan menentukan hasil akhir analisis. Ketiga komponen tersebut adalah:

²⁰“Teori Wawancara Psikodignostik - Fandi Rosi Sarwo Edi - Google Buku,” accessed November 21, 2022, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=uS96DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pengertian+wawancara+menurut+para+ahli&ots=zIVeqPzb7j&sig=0BvSMeQym686Wbhk--E4GGgcRe0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

a. Reduksi Data

Adalah komponen analisis pertama, proses selektif untuk memfokuskan, menyederhanakan, dan mengekstraksi data dari pengumpulan data yang sedang berlangsung dengan membuat ringkasan dari catatan yang diperoleh di lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data akan membahas pengolahan dan analisis data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, dimana data tersebut penulis dapatkan melalui interview dan mengkaji dokumen beserta arsip terkait, sebagai metode pokok guna mendapatkan suatu keputusan yang objektif. Di samping itu penulis menggunakan metode observasi dan dokumentasi sebagai metode penunjang guna melengkapi data yang telah penulis dapatkan melalui metode dokumentasi. Sebelum dianalisis data yang penulis peroleh terlebih dahulu dikumpulkan sesuai dengan jenis data yang ada, setelah data terkumpul menurut jenisnya masing-masing kemudian penulis menganalisa data dengan suatu metode untuk memaparkan dan menafsirkan data yang ada. Setelah data dianalisa kemudian diambil kesimpulan dengan berfikir induktif yaitu berangkat dari kesimpulan-kesimpulan khusus kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Dengan demikian dapat dihindari kesalahan dalam mengambil kesimpulan yang akan dijadikan fakta untuk mengetahui bagaimana Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam Pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM) Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan

melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pernyataan-pernyataan yang mungkin arahan sebab akibat dan proposisi-proposisi sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

J. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi serta batasan masalah, fokus penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan dalam penelitian. Mulai dari teori mengenai peranan dinas perindustrian dan perdagangan provinsi Lampung dalam pembinaan industri kecil menengah (IKM) di Provinsi Lampung, dan juga teori yang relevan dengan tema skripsi.

BAB III OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini berisikan mengenai gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta serta data di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Yakni meliputi pelaku IKM (industri kecil menengah) di Provinsi Lampung.

BAB IV PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang Analisis “PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMBINAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DI PROVINSI LAMPUNG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini berisikan tentang kesimpulan dan hasil, serta saran-saran. Kesimpulan disajikan berlandaskan hasil penelitian yang berisi uraian atau penjelasan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak-pihak yang terkait dengan hasil dari penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori tentang Industri Kecil Menengah (IKM)

Pengertian dan Kriteria Industri Kecil Menengah (IKM), yaitu :

1. Badan Pusat Statistik (BPS)

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai berikut:

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dijelaskan industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya. Sedangkan pengertian industri yang dikaitkan dengan proses pengolahan dan pengembangan industri yang digunakan sebagai dasar acuan dari pada Dinas Perindustrian, yaitu : industri adalah rangkaian kegiatan dan ekonomi yang meliputi pengolahan, pengerjaan, pengubahan, perbaikan bahan baku atau barang setengah jadi menjadi barang yang berguna dan lebih bermanfaat untuk pemakaian dan usaha jasa yang menunjang kegiatan diatas.

Menurut Biro Pusat Statistik industri kecil adalah sebuah industri yang mempunyai tenaga kerja 5 (lima) sampai dengan 19 (sembilan belas) orang tenaga yang terdiri dari pekerja kasar yang dibayar, pekerja pemilik dan pekerja keluarga yang tidak dibayar. Dengan demikian dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan industri, sub sektor industri kecil dan kerajinan rakyat diharapkan mempunyai peran strategis, yaitu sebagai penggerak utama peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pembaharuan tata nilai masyarakat.

Dalam perkembangannya industri kecil membawa misi pemerataan yaitu dengan penyebaran kegiatan usaha, peningkatan partisipasi bagi golongan ekonomi lemah, perluasan kesempatan kerja dan dengan pemanfaatan potensi ekonomi terbatas. Dalam rangka menunjang pembangunan daerah, maka pembangunann industri kecil disebar luaskan ke seluruh wilayah melalui penetapan

pusat pertumbuhan industri kecil, sentra industri, lingkungan industri.

Fungsi dari pusat-pusat pertumbuhan industri adalah:

- a. Sebagai pusat pembinaan dan penyuluhan termasuk bantuan bahan baku dan pemasaran;
- b. Sebagai tempat pelengkapan peralatan yang tidak dipergunakan bersama untuk suatu wilayah guna menyempurnakan produk;
- c. Sebagai sarana kerja untuk sejumlah terbatas pengusaha industri kecil.

Dengan adanya pusat-pusat pertumbuhan industri ini diharapkan hasil produksi dapat lebih meningkat yang disertai dengan peningkatan mutu produksi sehingga menjadi suatu hasil produksi dengan daya jual yang tinggi. Dari uraian tersebut di atas maka dapat diperoleh gambaran bahwa industri kecil mempunyai investasi modal yang relatif kecil. Sedangkan Industri menengah, yaitu suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, yang memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 20-99 orang.²¹

2. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mendefinisikan Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai berikut:

- a. Industri kecil, adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang lebih tinggi untuk penggunaannya dan memiliki nilai investasi antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.

²¹“Badan Pusat Statistik,” accessed February 25, 2023, <https://www.bps.go.id/subject/170/industri-mikro-dan-kecil.html>.

- b. Industri menengah, adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang lebih tinggi untuk penggunaannya yang memiliki investasi antara Rp. 200.000.000,- sampai 10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.²²

B. Perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Indonesia

Secara historis, industrialisasi di Indonesia sebenarnya telah dimulai pada masa penjajahan Belanda, tepatnya setelah pemerintah kolonial Belanda mengintrodusir sistem tanam paksa pada tahun 1830-an. Pada periode ini sejumlah industri seperti industri makanan dan minuman, tekstil dan rokok kretek telah ditemukan. Kemudian, industrialisasi modern di Indonesia dimulai ketika Presiden Soeharto berkuasa pada pertengahan 1960-an.²³

Pemerintah Orde Baru secara sengaja merombak struktur ekonomi Indonesia, dari yang berbasis pada sektor pertanian ke yang berbasis pada sektor industri. Usaha pemerintah Orde Baru itu memang tidak sia-sia. Sejak pemerintah Orde Baru telah terjadi transformasi yang cukup besar dalam struktur ekonomi Indonesia. Pada awal 1990-an, sumbangan sektor industri terhadap GDP mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan sektor pertanian. Jika sumbangan sektor pertanian kepada GDP turun menjadi 19 %, maka sumbangan sektor industri manufaktur mengalami peningkatan hingga tiga kali lipat, yaitu dari 8% menjadi 24 %.²⁴

Sebagaimana di negara-negara yang sedang berproses di dalam industrialisasi, tidak semua industri yang ada pada saat itu

²²Elabe Pinti, “Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi Dalam Mengembangkan Usaha Pada Industri Kecil Dan Menengah (Ikm) Pangan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam” (2013): 1–107.

²³“MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah,” accessed February 25, 2023, <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi>.

²⁴Suyadi, Syahdanur, and Susie Suryani, “Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Bengkalis Riau,” *Jurnal Ekonomi KIAT* 29, no. 1 (2018): 1–10.

merupakan industri besar. Tetapi, sebagian besar industri yang muncul adalah yang berkategori kecil menengah. Sampai tahun 2000-an, kelompok industri yang terkategori mikro, kecil, dan menengah tergolong yang paling besar di Indonesia.

Pengembangan dan penerapan perangkat-perangkat pengelolaan lingkungan diarahkan untuk mendorong seluruh pihak di dunia ini untuk melakukan tanggung jawab terhadap lingkungan serta menjadi fokus terbesar dalam upaya perbaikan pengelolaan lingkungan secara terpadu dan sistematis. Upaya terpadu dan sistematis tersebut antara lain meliputi kebijakan dan program pemerintah yang kondusif, praktek pengelolaan lingkungan oleh pelaku pembangunan mulai dari kegiatan hulu hingga hilir, penyediaan fasilitas pengelolaan lingkungan yang memadai, dan sebagainya.

Perkembangan industri yang terus meningkat membawa dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia setiap tahunnya. IKM berperan penting menjadi tulang punggung perekonomian nasional, bahkan mereka mampu berdiri tegak ketika kondisi ekonomi global sedang tidak stabil. IKM sendiri merupakan sektor mayoritas dari populasi industri di Indonesia. Selama ini, aktivitasnya konsisten membawa efek berganda yang luas dalam upaya mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hingga saat ini, jumlah IKM di dalam negeri melampaui 4,4 juta unit usaha atau mencapai 99 % dari seluruh unit usaha industri di Tanah Air. Selain itu, sektor industri mikro, kecil, dan menengah sudah menyerap hingga 10,5 juta tenaga kerja atau berkontribusi 65% dari sektor industri secara keseluruhan. Dari tahun 2015 sampai 2019, terdapat calon wirausaha baru sebanyak 57.417 peserta. Sampai tahun 2019, jumlah calon wirausaha baru yang sudah difasilitasi mendapatkan izin usaha mencapai 12.999 pelaku IKM (Industri Kecil Menengah).²⁵

²⁵“Kemenperin: Kemenperin Pacu Pertumbuhan IKM Untuk Menjadi Tulang Punggung Perekonomian Nasional,” accessed February 25, 2023, <https://kemenperin.go.id/artikel/21335/Kemenperin-Pacu-Pertumbuhan-IKM-untuk-Menjadi-Tulang-Punggung-Perekonomian-Nasional>.

C. Bentuk dan Jenis-Jenis Industri

Secara garis besar badan pusat statistik mendefinisikan industri dibedakan atas industri pengolahan dan industri jasa. Industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan suatu kegiatan barang dasar secara mekanis atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya yang lebih dekat kepada pemakai akhir, termasuk dalam kegiatan ini adalah kegiatan jasa industri dan pekerjaan perakitan.²⁶

Sedangkan industri jasa adalah kegiatan industri yang melayani keperluan pihak lain, sementara pihak lain pengelola hanya melakukan pengolahannya dengan mendapat imbalan sejumlah uang atau barang sebagai jasa, misalnya perubahan penggilingan padi atau gabah petani yang dibalas jasa dengan diperhitungkan secara bagi hasil.

Menurut pemerintah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) industri secara nasional dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Industri Dasar (hulu)

Yaitu meliputi industri mesin dan logam dasar serta industri kimia dasar. Industri dasar ini membawa misi pertumbuhan ekonomi, dan penguatan struktur ekonomi. Ciri industri dasar adalah teknologi tepat guna yang digunakan sudah maju dan teruji, serta tidak padat karya. Industri mesin dan logam dasar terdiri atas industri mesin dan peralatan pabrik, mesin perkakas, mesin listrik dan tenaga elektronika profesional, kendaraan bermotor, kereta api, pesawat terbang, kapal, besi baja, dan industri kimia dasar.²⁷

²⁶“Badan Pusat Statistik.”

²⁷“Kemenperin: Kemenperin Pacu Pertumbuhan Industri Hulu,” accessed February 25, 2023, <https://kemenperin.go.id/artikel/4141/Kemenperin-Pacu-Pertumbuhan-Industri-Hulu>.

2. Industri Hilir

Yang termasuk ke dalam industri hilir adalah usaha industri yang bahan bakunya bertumpu pada produk dari industri dasar. Misalnya aneka industri, yang terdiri atas industri pangan, tekstil, kimia, alat-alat listrik dan logam, bahan bangunan dan umum (perkayuan, keramik, asbes, marmer, gelas, botol, alat musik, dan alat-alat tulis). Aneka industri membawa misi pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan ekonomi. Teknologi tepat guna yang digunakan adalah teknologi maju, teruji, dan teknologi madya.²⁸

3. Industri Kecil

Bidang usaha yang dicadangkan untuk kelompok industri kecil adalah pemotongan hewan dan pengawetan daging, industri susu dan makanan dari susu, industri pengolahan, pengawetan buah-buahan dan sayur-sayuran, industri pengolahan dan pengawetan ikan, makanan dari tepung, gula dan pengolahan gula, es, makanan dari kedelai dan kacang-kacangan, dan pengolahan tembakau, rokok, pemintalan tenun dan pengolahan hasil tekstil, perajutan, pengawetan dan penyamakan kulit, barang dari kulit. Industri kecil ini menggunakan teknologi madya dan teknologi sederhana serta mempunyai tenaga kerja yang banyak. Misi yang dibawa oleh industri kecil adalah pemerataan.²⁹

Islam adalah agama yang Rahmatan Lil'alamin, yaitu rahmat bagi semesta alam. Dengan kata lain bahwa Islam merupakan agama yang sarat akan manfaat dan maslahat baik bagi individu maupun sosial. Islam juga agama yang senantiasa mengajarkan untuk memberikan manfaat, peranan atau

²⁸Bagja Waluya, "Industri Hulu Dan Industri Hilir," *Jurnal Pendedidikan Geografi* m (2012): 1-3, http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197210242001121-BAGJA_WALUYA/GEOGRAFI_EKONOMI/Industri_hulu_%26_hilir.pdf.

²⁹Fachry Noviar Singka, Nurmala K. Panjaitan, and Tjahja Muhandri, "Usaha Dan Pengembangan Industri Kecil Berbasis Komunitas Lokal," *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah* 9, no. 2 (2014): 158-169.

berkontribusi kepada sesama manusia maupun sesama ciptaan Allah Swt.³⁰

Islam memiliki prinsip tersendiri untuk meratakan kesejahteraan manusia, bahwa agar dalam hidup manusia saling kenal mengenal dan tolong menolong merupakan wadah kemitraan, kekeluargaan dan kebersamaan usaha yang sehat baik dan halal. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah (5) ayat 2:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 أَهْدَى وَلَا أَلْقَلِيدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
 قَوْمٍ ءَان صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ءَان تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
 عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan

³⁰Muhammad Khairan Arif, “Islam Rahmatan Lil Alamin From Social and Cultural Perspective,” *Al-Risalah* 12, no. 2 (2021): 169–186.

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (QS.Al-Maidah:2).

D. Peranan

Pengertian peranan yaitu bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Sedangkan peran itu sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Definisi peranan ialah sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan tersebut merupakan imbuhan dari norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan peranan ditentukan oleh norma di dalam masyarakat.³¹

Sedangkan peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan".

Dalam hubungan ini peranan menyangkut tiga hal yaitu :

1. peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau organisasi.
3. peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.³²

Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi antara

³¹“Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer / Peter Salim, Yenny Salim | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” accessed February 25, 2023, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=283009>.

³²“Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi / David Berry; Penerjemah, Paulus Wirutomo | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” accessed February 3, 2023, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=33651>.

satu dengan yang lain, dalam menjalankan kehidupan yang mempunyai banyak peranan antara lain³³ :

1.

Peranan individu, maksudnya bagaimana seseorang individu menjalankan perannya sebagai makhluk sosial dalam berhubungan dengan individu lain atau dalam kehidupan seperti atasan atau bawahan.

2.

Peranan organisasi atau kelompok merupakan kerja sama dua orang atau lebih dalam menjalankan perannya sebagai harapan para orang lain.

Pentingnya peranan, karena ia mengatur perilaku seseorang, meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

Dari pengertian-pengertian tersebut maka peranan mengandung maksud sesuatu yang menjadi tugas, fungsi dan kewajiban terhadap sesuatu hal atau kejadian yang intinya berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam suatu organisasi. Sebuah pemerintahan yang berjalan dan berkembang tidak terlepas dari pembuatan kebijakan sebagai awal dari arah tujuan pembangunan.

E. Pemerintahan

Pembangunan di bidang industri merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional yang harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga pembangunan bidang industri dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Dalam meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia maka Pemerintah harus lebih bijak mengenalkan program yang direncanakan untuk diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat

³³“The Essence of Humans as Social Beings – Faculty of Adab and Humanities,” accessed February 25, 2023, <https://adab.radenfatah.ac.id/main/index.php/2018/07/28/esensi-manusia-sebagai-makhluk-sosial/>.

mengembangkan ilmu dan sumber daya yang mereka miliki untuk diterapkan dalam kehidupan mereka yang mana perlu juga peran penting dari Pemerintah untuk menghasilkan masyarakat yang mandiri.³⁴

Konsep pemerintah didefinisikan adalah: merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara. Tujuan dari pemerintah bahwa: Pemerintah harus bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah, ia harus serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama, menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diinginkan oleh semua orang, yang dilukiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar.³⁵

Ada tiga fungsi hakiki pemerintahan, yaitu pelayanan (service) pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). Dalam hubungan tersebut Rasyid menjelaskan bahwa : “Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, dan pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat”.³⁶

Pembinaan dan pemberdayaan IKM dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah melalui berbagai macam program bantuan pembinaan. IKM yang mendapatkan bantuan, baik bantuan manajemen maupun pendanaan akan dapat meningkatkan usaha karena lebih efisien jika dibandingkan dengan IKM yang tidak mendapatkan bantuan. Industri Kecil Menengah (IKM) yang

³⁴Kemenperin, “Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 - 2035,” *Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035* (2015): 1–98.

³⁵Meisita Marhani Willar, Agustinus B.Pati, and Sofia E. Pengemnaan, “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia Di Desa Kecaatan Maesa Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 1–11, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/download/36213/33720>.

³⁶Ratnia Solihah, “Perihal Pemerintah Dan Yang Diperintah,” *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (2019): 1–63.

mendapat bantuan manajemen, teknologi dan finansial akan dapat memperkuat kelangsungan hidup usahanya.³⁷

Proses pemberian bantuan dapat berpengaruh terhadap peningkatan efisiensi proses produksi yaitu berbagai kebijakan yang dilakukan IKM dalam mengkombinasikan sumber permodalan, mengadakan perluasan pasar, menambah jumlah dan variasi produk serta meningkatkan tingkat upah. Program asistensi atau bantuan pemerintah dalam bentuk pemberian fasilitas produksi, penyediaan dan bantuan dalam bidang manajemen, teknik dan finansial diharapkan dapat meningkatkan kinerja usaha.³⁸

F. Peran Pemerintahan

Melaksanakan tugas pembangunan sangat penting dan merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat dan bukan hanya pemerintah semata-mata. Akan tetapi, meskipun demikian harus diakui bahwa pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Adapun peran pemerintah dalam kegiatan pembangunan, yaitu antara lain³⁹ :

1. Selaku Stabilisator

- a. Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai stabilisator dalam berbagai bidang pembangunan, yaitu antara lain bidang politik, ekonomi, dan bidang sosial budaya. Peran pemerintah dalam bidang politik adalah menjamin bahwa kehidupan politik bangsa tidak terjadi

³⁷Rachmad Hidayat and Yudha Herlambang, "Pengembangan Tata Kelola Industri Kecil-Menengah Di Madura," *Jurnal Teknik Industri* 11, no. 1 (2009): 61–71, <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/ind/article/view/17211>.

³⁸Surono Efendi et al., *Penguatan Industri Kecil Dan Menengah (IKM) Di Indonesia*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2019.

³⁹"Manajemen Sumber Daya Manusia / Sondang. P Siagian, | Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau," accessed March 8, 2023, <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=22333>.

rongrongan, baik yang datang dari kekuatan politik dalam negeri sendiri maupun yang datang dari luar.⁴⁰

- b. Dalam bidang ekonomi pemerintah diharapkan untuk dapat menjamin kondisi stabilitas ekonomi yang memungkinkan perekonomian nasional dapat terpelihara sedemikian rupa sehingga ekonomi tumbuh secara wajar, suku bunga yang tidak tinggi, rendahnya inflasi, kesempatan berusaha makin luas, proses industrialisasi. industrialisasi berlangsung dengan baik, dan kebijakan moneter dan fiskal yang menguntungkan bagi kehidupan nasional.⁴¹
- c. Bidang sosial budaya, pemerintah diharapkan dapat menjadi Negara dan bangsa menjadi masyarakat maju dan modern, tanpa kehilangan jati dirinya. Peran pemerintah selaku stabilisator, yaitu dalam hal mewujudkan perubahan tidak berubah jadi gejala sosial, apalagi yang dapat merupakan ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan berbagai cara, yaitu antara lain kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan persuasif, dan pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan.⁴²

2. Selaku Modernisator

Melalui pembangunan setiap negara menginginkan menjadi negara yang modern. Untuk mewujudkan hal itu

⁴⁰UD RI, “Undang - Undang RI Nomor 34 Tahun 2017” 6 (2017): 5–9.

⁴¹Eka Budiyantri and Lisnawati, “Analisis Faktor Fundamental Ekonomi Yang Mempengaruhi Risiko Pinjaman Luar Negeri Indonesia,” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2010): 129–152, http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_keuangan.

⁴²Murdiana Asih Heningtyas, Sjamiar Sjamiuddin, and Minto Hadi, “Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Nonformal,” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 2, No. 2 (2010): 5, <https://media.neliti.com/media/publications/77616-ID-peran-pemerintah-dan-masyarakat-dalam-up.pdf>.

diperlukan antara lain penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki, sistem pendidikan nasional yang handal, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan, pemberdayaan rakyat, kesediaan mengambil resiko, orientasi masa depan, dan bersedia menerima perubahan. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan pembangunan yang sistematis, programatis, dan berkelanjutan. Pemerintah bertugas untuk menuntun masyarakatnya ke arah kehidupan modern seperti itu. Proses modernisasi harus terjadi di lingkungan birokrasi pemerintah sendiri.⁴³

3. Selaku Pelopor

Pemerintah harus memainkan peranan selaku pelopor dalam berbagai segi kehidupan bernegara. Dengan kata lain bahwa selaku pelopor, aparatur pemerintah harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat. Kepeloporan yang dapat diberikan pemerintah misalnya kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin dengan pemanfaatan waktu sebaik-baiknya dengan orientasi hasil yang semaksimal mungkin, kepeloporan dalam penegakan disiplin, kepeloporan dalam ketaatan kepada peraturan perundang-undangan dan sebagainya.⁴⁴

4. Selaku pelaksana sendiri

Meskipun pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal yang terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak

⁴³Harjanto Imam, *Teori Pembangunan*, Malang: Universitas Brawijaya, 2011.

⁴⁴Dorte Nova Lobbu, Florence Daicy J.Lengkong, and Jericho D.Pombengi, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Dodap Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–1699.

diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional memang merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah.⁴⁵

Sebagaimana peran pemerintah tersebut sebagai stabilisator, inovator, pelopor, dan pelaksana sendiri, pembangunan nasional harus diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi seluruh elemen pemerintah dengan ideal atau sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga terjadi keseimbangan dan gerak yang dinamis dalam roda pemerintahan yang baik.

G. Peran Pemerintah dalam Islam

Islam menganggap pemerintahan sebagai salah satu dasar sistem sosial yang dibuat untuk manusia. Islam tidak menghendaki kekacauan dan tidak membiarkan satu jamaah tanpa Imam (pemimpin). Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan Islam dalam pemerintahan adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan wajar. Pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, secara umum tugas pokok pemerintah adalah menjamin diterapkannya perlakuan adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.⁴⁶

Pemerintah melakukan pekerjaan umum, dan memberi

⁴⁵Rianto Rianto et al., "Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kelurahan Amal Bakti Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri HILIR," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 4, no. 1 (2022): 926–948.

⁴⁶Rahmawati Rahmawati, "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 2 (2018): 264–283.

pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, serta kebijakan lain dan menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.⁴⁷

Pemerintahan dalam Islam berdiri di atas beberapa prinsip, yang kita sebut dengan struktur dasar pemerintahan, yaitu tanggung jawab pemimpin, membina persatuan umat dan menghormati hak-hak asasinya. Antara lain,⁴⁸

1. Tanggung Jawab Pemimpin

Seorang pemimpin bertanggung jawab di depan Allah dan rakyat. Seorang pemimpin adalah pekerja atau pelayan umat manusia.

Islam mengatur tentang tanggung jawab sebagai pemimpin yang adil untuk umat manusia. Dalam Al-Qur'an Allah Swt berfirman surat Al-Shaad (38) Ayat 26.

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ
يُضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ

⁴⁷Baharuddin Thahir, “Kebijakan Sosial Dan Otonomi Daerah,” *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* (2019): 1–12.

⁴⁸Saepul Rizal and Agung Nurrahman, “PEMERINTAHAN DALAM ISLAM(Telaah Buku Fikrotul Idari Fiil IslamKarya Muhammad Nasyir),” *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 11, no. 2 (2021): 231–239, <http://scholar.google.co.id/>.

Artinya : “*Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan*”. (Surat Al-Shaad (38) Ayat 26).

2. Persatuan Umat

Umat Islam adalah satu, karena persaudaraan adalah dasar untuk mewujudkan dan menyempurnakan keimanan. Hal ini tidak berarti melarang adanya kebebasan berpendapat atau saling menasehati antara yang kecil dan yang besar dan sebaliknya, dalam Islam disebut sebagai *Amar Makruf Nahi Mungkar*.

3. Menghormati Umat

Hak umat Islam untuk mengawasi pemimpinnya, kemudian memberikan peringatan agar melakukan kebaikan, pemimpin (pemerintah) harus mengadakan musyawarah dengan rakyat dan menghormati hak-hak asasinya, serta mengambil pendapat yang menuju kebaikan bersama. Allah memerintahkan kepada para pemimpin untuk bermusyawarah. Dalam Al – Qur’an Allah Swt berfirman Surat Ali ‘Imran (3) :Ayat 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ

لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ^ط فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي

الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ



Artinya : *”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”*. (Q.S Ali 'Imran (3) :Ayat 159).

Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa Allah swt.memerintahkan kepada para pemimpin untuk bermusyawarah terlebih dahulu dalam urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. Begitu pula sunnah Rasulullah saw. dan para Khulafaur Rasyidin memerintahkan agar umat Islam selalu melakukan musyawarah jika ada suatu urusan kumpulkanlah ahli-ahli pikir dari kaum muslimin, kemudian mengadakan musyawarah dan mengambil pendapat yang mengandung kebaikan, dan keputusannya berlaku bagi seluruh umat.

Sebuah negara (pemerintahan) dalam Islam harus memiliki empat dasar bagi proses penyelenggaraan negara yang menjiwai nilai-nilai atau etika Islam⁴⁹, diantaranya ;

- a. Amanat yang bertanggung jawab, kejujuran, dan keikhlasan. Dasar ini lebih mendalam daripada

⁴⁹R Pangestu, A Addiarrahman, and B Badaruddin, “Politik Ekonomi Islam Menurut Zainal Abidin Ahmad Dan Relevansinya Di Indonesia” (2021), [http://repository.uinjambi.ac.id/10061/%0Ahttp://repository.uinjambi.ac.id/10061/1/SKRIPSI RIDWAN PANGESTU _ 501171736.pdf](http://repository.uinjambi.ac.id/10061/%0Ahttp://repository.uinjambi.ac.id/10061/1/SKRIPSI%20RIDWAN%20PANGESTU%20_501171736.pdf).

“kemanusiaan yang beradab” dan “kebangsaan yang luhur”.

- b. Keadilan yang luas untuk seluruh manusia, termasuk “keadilan sosial”.
- c. Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang tertulis dalam perintah “taatlah kepada Tuhan dan Rasul-Nya”.
- d. Kedaulatan rakyat, yang dicantumkan dalam perintah “Ulil Amri”.

Pemerintahan yang mencerminkan moral Islam akan bertindak berdasarkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan amanah. Pemerintah yang adil akan mampu mendistribusikan banyak kebaikan kepada rakyatnya, mendengar aspirasi dari rakyatnya, baik yang hidup di kota maupun di desa, yang kaya maupun miskin, terpendang ataupun tidak. Pemerintah harus berlaku adil terhadap seluruh masyarakat yang dipimpinnya, karena keadilan sangat dekat dengan keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Tuhannya.

Etika pemerintahan termasuk dalam etika praktis. Dalam kehidupan masyarakat modern sudah menjadi rumus bahwa setiap profesi memiliki dasar-dasar etikanya sendiri. Dengan kata lain, sesuatu nilai etika harus menjadi acuan atau pedoman bertindak yang pelanggaran atasnya akan membawa akibat-akibat moral. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam konteks pemerintahan etika pemerintahan menjadi landasan moral bagi penyelenggaraan pemerintahan dan dengan demikian dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan Etika pemerintahan adalah nilai-nilai etik pemerintahan yang menjadi landasan moral bagi penyelenggara pemerintahan. Keberhasilan pejabat pemerintahan di dalam memimpin pemerintahan harus diukur dari kemampuannya mengembangkan fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

H. Ekonomi Islam

Definisi Ekonomi Islam, ekonomi islam mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara kaffah (menyeluruh) dalam aspek ekonomi. Dengan kata lain, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin pada perilaku masyarakat Muslim yang ada saat ini.⁵⁰

Ekonomi islam dibangun atas dasar agama islam, karena ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama islam. Sebagai derivasi dari agama islam, ekonomi islam akan mengikuti agama islam dalam berbagai aspeknya, islam dalam sistem kehidupan, dimana islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.

⁵¹

Definisi yang lengkap harus memperhatikan beberapa syarat, yaitu ciri-ciri pandangan dunia Islam. Syarat utamanya adalah memasukkan nilai-nilai syariah ke dalam ekonomi, ilmu tentang nilai-nilai moral. Nilai moral merupakan aspek normatif yang harus diperhatikan saat menganalisis fenomena ekonomi dan saat mengambil keputusan menurut hukum syariah. Adapun beberapa pendapat para ahli⁵² sebagai berikut :

- a. Akram Khan merumuskan pengertian ekonomi Islam sebagai: "Islamic economics aims to the study of human falah (well-being) achieved by organizing there sources of the earth on the basic of cooperation and participation."
- b. Muhammad Abdul Mannan dalam buku Islamic

⁵⁰“Pengantar Ekonomi Islam / Oleh, Jaharuddin, Bambang Sutrisno | OPAC Perpustakaan Nasional RI,” accessed April 2, 2023, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1193566>.

⁵¹“Ekonomi Islam / Ditulis Oleh Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia | OPAC Perpustakaan Nasional RI,” accessed April 2, 2023, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=342094>.

⁵²Abdul Qoyum et al., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 2021.

Economics, Theory, and Practice, mengatakan: "Islamic economics is social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam."

- c. M. Umer Chapra, mengatakan: "Islamic economics was defined as that branch of knowledge which help realize human well-being through an allocation and distribution of scare resources that is in conformity with Islamic teaching without unduly curbing individual freedom or creating continued macro economic and ecological imbalances."
- d. Syed Nawab Haider Naqvi merumuskan definisi Ekonomi Islam sebagai berikut: "Islamic economics is the representative Muslim's behaviour in a typical Muslim society."
- e. Munawar Iqbal, sebagai mana dikutip Dawam Raharjo, mengatakan: "Ekonomi Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang mempunyai akar dalam syariah Islam. Islam memandang wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang paling utama. Prinsip-prinsip dasar yang dicantumkan dalam Alquran dan hadis, adalah batu ujian untuk menilai teori-teori ekonomi modern dan untuk mengembangkan teori-teori baru berdasarkan doktrin ekonomi Islam. Dalam hal ini, sebuah himpunan hadis merupakan sebuah buku sumber yang sangat berguna."
- f. Ziauddin Ahmad, Ekonom Pakistan, merumuskan bahwa ekonomi Islam pada hakikatnya adalah upaya pengalokasian sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa sesuai petunjuk Allah Swt. untuk memperoleh ridha-Nya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah penerapan konsep-konsep Al-Qur'an dan hadist, baik langsung maupun tidak langsung dengan ekonomi dalam aktivitas ekonomi. Dengan kata lain, ayat Alquran dan hadis menjadi

inspirasi pertama dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

1. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan sumber ekonomi syariah pertama dan terpenting, Al-Qur'an juga memberikan hukum-hukum ekonomi yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita ekonomi Islam. Al-Qur'an memberikan hukum-hukum ekonomi yang dapat menciptakan stabilitas ekonomi itu sendiri. Sudah mafhum di antara kita sebagai umat Muslim bahwa agama Islam merupakan agama yang komprehensif dan juga Rahmatan lil 'Alamin. Agama ini didalamnya bukan hanya mengatur peribadatan kepada Allah semata, tapi juga hal-hal di luar itu, seperti cara kita makan dan minum, cara kita berpakaian dan lain-lain. Atau dengan kata lain, Islam sebagai wayoflife telah memberi pedoman kepada kita dalam berbagai aspek kehidupan.⁵³ Islam sebagai wayoflife seperti yang tercantum dalam Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 9:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ
الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih Lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar”. (Q.S Al – Isra ayat 9)

Islam, melalui kitab sucinya, Al-Qur'an memang secara global telah menjelaskan way of life tersebut dan aplikasi dari ajaran Islam tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Secara rinci dan detail apa yang ada dalam Al-Qur'an kemudian dijelaskan oleh Rasulullah melalui sunnahnya. Seperti yang dijelaskan dalam Hadits Shahih dari Ummul Mu'minin Aisyah Rasulullah:

⁵³ITANG ITANG, “Dasar Hukum Ekonomi Islam,” *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): 1–13.

ketika Ia ditanya mengenai akhlaq Rasulullah Saw "Akhlaq Beliau adalah Al-Qur'an" (HR. Bukhari). Dan disebutkan pula dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya : "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah." (Q.S. Al-Ahzab ayat 21).

Dengan teladan dan akhlaq Rasulullah maka kita telah mendapatkan pedoman yang jelas bagaimana kita berperilaku baik dalam ibadah maupun dalam aktivitas sehari-hari, termasuk didalamnya adalah aktivitas ekonomi. Berbagai aspek kehidupan manusia termasuk didalamnya mengenai ekonomi. Begitu banyak Hadits dari Rasulullah yang menjelaskan tentang ekonomi. Mulai dari yang dianjurkan, yang diwajibkan, yang diperbolehkan hingga hal yang dilarang.

Adapun ekonomi atau Muamalah para ulama telah mengelompokkannya ke dalam urusan duniawi seperti halnya teknologi. Oleh sebab itu mereka telah menetapkan kaidah Fiqh yang agung mengenai bagaimana seorang Muslim bertindak dalam perkara dunawi ini, yaitu hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Rasulullah pun telah bersabda tentang hukum dari masalah keduniawian ini, yaitu: "Kalian lebih mengetahui urusan duniamu" (HR. Muslim). Oleh sebab itu, umat Muslim diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi aktivitas ekonomi dan aktifitas keduniawian lainnya selama tidak ada larangan akan hal tersebut dan tidak melanggar batasan-batasan utama yang sebelumnya telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits.

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut⁵⁴.

- a. Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah Swt. kepada manusia, sehingga pemanfaatannya harus bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. Implikasinya adalah manusia harus menggunakannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain.
- b. Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah.
- c. Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nissa : 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nissa : 29).

⁵⁴ Abu Bakar, “Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2020): 233–249.

- d. Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang kaya, dan harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari oleh sunnah Rasulullah Saw. yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama atas air, padang rumput. dan api.
- f. Seorang Muslim harus tunduk pada Allah Swt. dan hari pertanggungjawaban di akhirat Allah Swt. berfirman dalam surah Al-Baqarah: 281 :

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا
 كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : *“Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian masing-masing diri diberi Balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)”*. (Q.S. Al-Baqarah: 281).

Kondisi ini akan mendorong seorang Muslim menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan judi (maisir), penipuan (gharar), dan berusaha dengan cara yang batil, melampaui batas, dan sebagainya.

- g. Islam melarang riba dalam segala bentuknya. Secara tegas dan jelas hal ini tercantum dalam Alquran surah

Ar-Rum: 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (Q.S. Ar-Rum ayat 39)

Prinsip ekonomi Islam yang menjadi landasan ekonomi Islam didasarkan pada lima nilai universal, yaitu: tauhid (iman), “adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (tata kelola), nilai-nilai dan ma’ad (hasil). kelima nilai tersebut menjadi dasar inspirasi penyusunan teori-teori ekonomi Islam. Diantaranya, yaitu⁵⁵ :

a. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah dasar ajaran Islam. Melalui tauhid, manusia membuktikan bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi dan segala isinya kecuali Allah, karena Allah adalah pencipta sekaligus Pemilik alam semesta dan isinya, termasuk pemilik manusia dan semua sumber daya yang ada. Oleh karena itu, Allah SWT adalah pemilik tertinggi dan hakiki. Manusia diberi

⁵⁵Syaparuddin, “Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Berbagai Permasalahan Sosial-Ekonomi,” *Muqtasid* 1, no. 1 (2010): 1–19.

amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

Segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah hanya untuk beribadah kepada-Nya. Oleh karena itu, segala aktivitas manusia yang berhubungan dengan alam dan sumber daya alam dan manusia (muamalah) dibingkai dalam kaitannya dengan Allah SWT. Karena baginya orang bertanggung jawab atas semua tindakan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

b. 'Adl

Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan salah satu sifat-Nya adalah keadilan. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan dzalim terhadap makhluk-Nya. Sebagai khalifah manusia di bumi, manusia harus mematuhi hukum Allah di bumi dan memastikan bahwa semua sumber daya digunakan untuk hanya untuk kebaikan kesejahteraan rakyat dan semua orang mendapatkan manfaat secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil. Islam mendefinisikan keadilan sebagai tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Penerapan ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

Tanpa keadilan, orang-orang terpecah menjadi kelas-kelas yang berbeda. Satu kelompok mengintimidasi yang lain, yang mengarah pada eksploitasi orang. Keserakahan setiap orang mendorong mereka untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang mereka berikan. Keadilan dalam hukum Islam juga berarti keseimbangan antara kewajiban (mukallaf) yang harus dilakukan seseorang dengan kemampuan seseorang untuk melakukan tugas tersebut. Dalam bidang usaha untuk meningkatkan perekonomian, kekayaan harus beredar tidak hanya kepada si kaya, tetapi juga kepada si miskin, karena keadilan adalah "nafas" yang

menciptakan keadilan dan kemakmuran.

c. Nubuwwah

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah SWT, manusia tidak tinggal di dunia tanpa petunjuk. Oleh karena itu, para Nabi dan Rasul diutus untuk menyampaikan petunjuk kepada umat Allah tentang bagaimana menjalani kehidupan yang baik dan benar di dunia serta mengajarkan kepada mereka cara untuk kembali (bertobat) kepada awal dari segala yang ada pada Allah.

Peran Rasul adalah menjadi teladan terbaik yang harus diteladani manusia untuk memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat. Bagi umat Islam, Allah mengirimkan model manusia yang terakhir dan sempurna untuk diteladani hingga akhir zaman, Nabi Muhammad. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah Sidiq (benar, jujur), amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

d. Khilafah

Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, yang berarti pemimpin dan kemakmuran bumi. Karena pada dasarnya setiap orang adalah pemimpin. Nabi bersabda: "setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinnya". Hal ini berlaku untuk semua orang, baik individu, anggota keluarga, tokoh masyarakat maupun kepala negara. Nilai ini mendasari prinsip Islam tentang kehidupan manusia secara kolektif (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga ketertiban interaksi kelompok, termasuk dalam bidang ekonomi, sehingga kekacauan dan kebisingan dapat dihilangkan atau dikurangi. Dalam Islam, pemerintah memainkan peran kecil tapi sangat

penting dalam perekonomian. Tugas utama mereka adalah memastikan ekonomi berjalan sesuai dengan hukum Syariah dan memastikan hak asasi manusia tidak dilanggar. Semua ini adalah bagian dari pencapaian tujuan Syariah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Ini dicapai dengan melindungi iman, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan orang.

Kedudukan khalifah atau pembawa perintah Allah bersifat universal bagi semua orang, tidak ada keistimewaan khusus bagi orang atau bangsa tertentu dalam menjalankan tugas kekhalifahan. Namun, ini tidak berarti bahwa orang selalu memiliki atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat dari alam semesta. Mereka dipersatukan hanya secara kebetulan, dan semua bisa mendapatkan keuntungan yang sesuai kemampuan.

Individu diciptakan Allah dengan kemampuan yang berbeda-beda, dan secara naluriah diperintahkan untuk hidup bersama, bekerja sama, dan memanfaatkan kemampuan masing-masing. Namun, ini tidak berarti bahwa Islam memberikan prioritas kepada pemberi kerja di atas pekerjaan dalam hal martabat manusia atau status hukum. Hanya saja pada saat tertentu seseorang menjadi majikan dan pada saat lain menjadi pekerja. Pada saat lain situasinya bisa berbalik, mantan majikan bisa menjadi pekerja dan sebagainya dan hal serupa juga bisa diterapkan terhadap budak dan majikan.

e. Ma'ad

Meski sering diterjemahkan sebagai kebangkitan, ma'ad secara harfiah berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Kehidupan manusia tidak hanya di dunia ini tetapi berlanjut di akhirat. Pandangan khas tentang dunia dan masa depan seorang muslim dapat dirumuskan sebagai berikut: Dunia adalah ladang akhirat. Artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh), namun demikian akhirat lebih baik dari pada dunia.

Karena itu adalah Tuhan melarang manusia terikat hanya dengan dunia, karena dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, kenikmatan dunia tidaklah seberapa. Setiap semua individu memiliki satu kesamaan dalam hal harga diri manusia. Kita tidak boleh membeda-bedakan berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin atau usia. Hak dan kewajiban ekonomi setiap individu disesuaikan dengan kapasitas dan peran normatif masing-masing dalam struktur sosial. Berdasarkan hal tersebut, muncul beberapa perbedaan antara orang dewasa di satu pihak dan orang tua atau muda di pihak lain, atau antara laki-laki dan perempuan perlu penyesuaian. Islam tidak mengakui adanya kelas sosial ekonomi yang bertentangan dengan prinsip persamaan dan persaudaraan (ukhuwah).

3. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam tidak terlepas dari tujuan penciptaan manusia di muka bumi. Kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kegiatan manusia di muka bumi. Maka Islam juga mengatur segala sesuatu yang menyangkut aktivitas manusia dalam perekonomian. Manusia diciptakan tidak hanya sebagai seorang petapa yang tidak ikut serta dalam aktivitas duniawi, tetapi juga sebagai manusia bumi yang tidak mengindahkan aturan Allah SWT dalam segala perbuatannya. Namun Allah SWT menciptakan manusia agar manusia menjadi khalifah (wakil Allah SWT) yang mempunyai tugas memakmurkan bumi, yaitu menciptakan kemakmuran dengan segala kreasi menuju kebaikan.⁵⁶

Dalam Islam, pencapaian tujuan ekonomi sejalan dengan tujuan hukum Islam (maqashid syariah), yaitu memperoleh manfaat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat melalui tatanan kehidupan yang baik dan mulia (hayyatan thayyiban).⁵⁷ Tujuan ini dapat dicapai dengan melakukan

⁵⁶Ibid.

⁵⁷Etc. Azharsyah, *Pengantar Ekonomi Islam*, 2021.

kegiatan apa pun untuk mencapai hal-hal yang bermanfaat bagi orang banyak, atau dengan menemukan suatu kegiatan yang secara langsung dapat mewujudkan manfaat itu sendiri. Keuntungan finansial juga dapat dicapai dengan menghindari segala sesuatu yang membawa makna (kerugian) bagi seseorang.

Falah dapat tercapai jika kebutuhan hidup manusia terpenuhi secara seimbang. Pemenuhan kebutuhan tersebut akan membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Masalah menunjukkan segala bentuk keadaan, baik fisik maupun mental, yang mampu memberikan manfaat di dunia dan akhirat. Serta terpenuhkannya kebutuhan ekonomi merupakan salah satu bahan untuk mencapai masalah yaitu dengan al-mal. Akan tetapi, pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam Islam harus didasarkan pada pemikiran bahwa setiap kegiatan ekonomi memiliki aspek keagamaan yang dapat dilakukan pada setiap tingkat kegiatan. Dalam itikad baik, setiap unsur sistem dikatakan menghasilkan perbuatan baik yang mencerminkan akhlak mulia. Untuk mengharmoniskan berbagai macam kegiatan, maka diberkahi dengan sistem syariah yang tentunya diselaraskan dengan hukum positif yang berlaku dalam suatu sistem sosial. Implementasi⁵⁸ aturan syariah dan etika yang baik akan menciptakan fenomena persatuan dalam pelaksanaan kegiatan muamalah yang mengutamakan kesejahteraan bersama dalam pencapaian tujuan ekonomi.⁵⁹

Kemaslahatan dalam bidang ekonomi sebagaimana yang dimaksudkan di atas akan tercapai jika hal-hal berikut terwujud diantaranya:

a. Kesejahteraan Ekonomi dengan Berpegang pada Norma

⁵⁹K Amirudin, "Nilai Maslahat Dalam Sistem Ekonomi Islam" (2015): 62-75.

Moral. Berkaitan dengan ini, Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah Ayat 60 :

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan”. (Q.S. Al-Baqarah Ayat 60).

Islam menghendaki agar setiap manusia mencari rahmat (karunia) Allah SWT, dengan tidak menghalangi orang lain untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran. Memang, setiap manusia harus mampu melakukan kegiatan ekonomi dalam kerangka manfaat bersama untuk kepentingan bersama.

Islam mendorong orang untuk bekerja dan mengutuk perbuatan memintaminta. Di dalam hadis disebutkan bahwa seseorang yang mencari penghidupan dengan jalan yang baik demi mencegah dirinya dari meminta-minta untuk menafkahi keluarganya, dan untuk bisa berbuat baik dengan tetangga, kelak di hari akhir akan menemui Tuhannya dengan wajah berseri-seri. Islam melarang seseorang meminta-minta dan

mendorong seseorang untuk bisa berbuat menghidupi diri dan keluarganya. Itulah sebabnya salah satu tujuan ekonomi masyarakat Muslim adalah menciptakan lingkungan ekonomi di mana setiap orang memiliki kesempatan kerja yang tepat.

- b. Persaudaraan dan Keadilan Manusia berasal dari satu ayah dan satu ibu. Berbagai jenis suku bangsa yang ada di dunia ini, dari berbagai warna kulit, badan, rupa, keturunan, semuanya (sebenarnya) merupakan satu keluarga besar dari Ayah (Adam as) dan Ibu (Hawa) yang sama. Di antara mereka, entah yang kaya raya atau yang hidup kekurangan, yang cerdas luar biasa ataukah yang mengalami keterbelakangan, yang punya kuasa ataukah rakyat jelata, tidak ada yang lebih mulia, kecuali di antara mereka yang paling bertakwa, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hujarat ayat 13 :

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ

شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. Al – Hujarat ayat 13)

Di dalam Islam, keadilan bersifat imparial terhadap semua orang dan golongan dengan mengesampingkan emosional yang diakibatkan oleh persepsi tertentu terhadap kaum atau golongan tertentu. Salah satu bentuk keadilan ekonomi dalam Islam adalah pola hubungan antara pekerja dengan majikan kerja. Setiap pekerja berhak atas upahnya dengan segera atas kerja yang mereka berikan. Selain itu, pemberi pekerjaan dilarang keras mengeksploitasi pekerja, dan membebani pekerja dengan sesuatu di luar kemampuannya.

- c. Kesetaraan Distribusi Pendapatan Dalam konsep tauhid bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan ada di dunia ini, baik berupa harta, tanah, alam, bahkan tenaga kerja dan akal yang ada pada setiap individu pada hakekatnya adalah milik Allah SWT yang dipercayakan kepada Allah SWT. Manusia mengerjakannya sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan darinya. Hal ini mengandung makna bahwa tidak ada alasan untuk menahan sumber daya yang diberikan oleh Allah SWT hanya kepada kelompok tertentu. Dalam konteks ini, hukum Islam menekankan pemerataan distributif dan menyediakan sistem untuk mencapai pemerataan pendapatan, dengan harapan agar setiap individu mendapat jaminan bahwa ia akan mampu mencapai tingkat pendapatan yang adil, hidup dengan baik dan terhormat. Islam menganjurkan penciptaan sistem sosial yang menjamin setiap anggota masyarakat standar kehidupan yang layak dan terhormat.
- d. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Keyakinan pada hukum Islam mengajarkan bahwa manusiadiciptakan oleh Tuhan dan hanya mengabdikan kepada-Nya. Allah berfirman dalam Q.S. Luqman ayat 22:

❁ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَنقَبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾

Artinya : “Dan Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang Dia orang yang berbuat kebaikan, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan”. (Q.S. Luqman ayat 22).

Ayat di atas memberi isyarat bahwa kita melepaskan semua tautan kecuali tautan kepada Allah SWT saja. Tidak ada pembatasan hak seseorang yang dapat dikenakan pada orang yang bebas, cerdas, dan dewasa, kecuali orang itu melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan orang lain atau kepentingan umum. Bahkan terdapat keharusan untuk melakukan pengendalian dan pembatasan bagi pekerja yang tidak amanah, pejabat yang kotor, pejabat yang korupsi, hakim yang tidak adil dan mereka yang mengabaikan hak dan kepentingan publik, untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi.

DAFTAR RUJUKAN

Jurnal

- Adawiyah, Wiwiek Rabiatul. “Faktor Penghambat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Studi Di Kabupaten Banyumas.” *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* 2, no. 2 (2014): 165.
- April, Bulan. “INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERFASILITASI KONSU Bandar Lampung , 30 April 2022 Kepala Seksi Desain Dan Kemasan Kordinator Rumah Kemasan Media Lisna , S . Gz , M . Kes AN MERK INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) PROVINSI LAMPUNG Su,” no. 1 (2022).
- Azharsyah, Etc. *Pengantar Ekonomi Islam*, 2021.
- bahagia, fajar. “Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar Dalam Meningkatkan Ekonomi Pengrajin Rencong Di Gampong Baet” (2017): 1–62.
- Bakar, Abu. “Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (2020): 233–249.
- Brigette Lantaeda, Syaron, Florence Daicy J. Lengkong, and Joorie M Ruru. “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon.” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 04, no. 048 (2002): 243.
- Budiyanti, Eka, and Lisnawati. “Analisis Faktor Fundamental Ekonomi Yang Mempengaruhi Risiko Pinjaman Luar Negeri Indonesia.” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2010): 129–152.
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_keuangan.
- Efendi, Surono, Eddy Guridno, Edi Sugiono, and Sufyati. *Penguatan Industri Kecil Dan Menengah (IKM) Di Indonesia. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2019.
- Halim, Abdul. “Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (2020): 157–172. <https://stiemmamaju.e-journal.id/GJIEP/article/view/39>.
- Heningtyas, Murdiana Asih, Sjamsiar Sjamsuddin, and Minto Hadi. “Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Upaya

- Pengembangan Pendidikan Nonformal.” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 2, No. 2 (2010): 5. <https://media.neliti.com/media/publications/77616-ID-peran-pemerintah-dan-masyarakat-dalam-up.pdf>.
- ITANG, ITANG. “Dasar Hukum Ekonomi Islam.” *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): 1–13.
- Lobbu, Dorteia Nova, Florence Daicy J.Lengkong, and Jericho D.Pombengi. “Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Dodap Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–1699.
- Marzuki, Marzuki. “Reformasi Birokrasi Dan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 42, no. 2 (2016): 11.
- Masyhuri. “Prinsip-Prinsip Tazkiyah Al-Nafs Dalam Islam Dan Hubungannya Dengan Kesehatan Mental.” *Jurnal Pemikiran Islam* 37, no. 2 (2012): 95–102.
- Wahyudi, Rizky. “Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah Kota Medan.” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1, no. 5 (2022): 671–676.
- Wulandari, Ayu. “Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Menengah (Ikm) Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 4, no. 1 (2021): 483–490.
- “MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah.” Accessed February 25, 2023. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi>.

Buku

- Amirudin, K. “Nilai Masalah Dalam Sistem Ekonomi Islam” (2015): 62–75.
- Arif, Muhammad Khairan. “Islam Rahmatan Lil Alamin From Social and Cultural Perspective.” *Al-Risalah* 12, no. 2 (2021): 169–186.
- Ii, B A B, and A Peran. “Organization and Management.” *Handbook of Educational Ideas and Practices* (2015): 377–518.
- Ii, B A B, and Landasan Teori. “Jbptunikompp-Gdl-Mohhabibin-28322-4-Unikom_M-I” (2002): 9–22.
- Metode Penelitian,” no. 64 (2002): 30–38.
- Imam, Harjanto. *Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya, 2011.
- Iman Setya Budi, and Arie Syantoso. “Analisis Konsep Hak Dan Kewajiban Outsourcing Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2018): 100–120. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/1691>.
- Ir. Hendra Hamid, M.Si. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. De La Macca*. Vol. 1, 2018.
- Jaih Mubarak, Khotibul Umam , Destri Budi Nugraheni, Veri Antoni, and Shandy Primandasetio, Kesumawati Syafei. *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, 2018.
- Kamaluddin, Imam. “Perindustrian Dalam Pandangan Islam.” *Hukum dan Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2018): 239–252.
- Kemenperin. “Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 - 2035.” *Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035* (2015): 1–98.
- Kementerian Agama Provinsi Lampung. “Kementerian Agama Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2020” (2020).
- Larnpung, Cabang, Pemantauan Lingkungan, Industri Makanan, and Ringan Kemasan. “. Gubernur Lampung” 2 (2015): 1–10.
- Pangestu, R, A Addiarrahman, and B Badaruddin. “Politik Ekonomi Islam Menurut Zainal Abidin Ahmad Dan Relevansinya Di Indonesia” (2021). [http://repository.uinjambi.ac.id/10061/1/SKRIPSI RIDWAN PANGESTU _ 501171736.pdf](http://repository.uinjambi.ac.id/10061/1/SKRIPSI%20RIDWAN%20PANGESTU%20501171736.pdf).
- Pemerintah Indonesia. “PP No. 32 Tahun 1998.” *Lembaran*

- Negara RI* (1998): 46.
- Pemerintah Provinsi Lampung. “Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah” (2021).
- Pinti, Elabe. “Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi Dalam Mengembangkan Usaha Pada Industri Kecil Dan Menengah (Ikm) Pangan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam” (2013): 1–107.
- Qoyum, Abdul, Asep Nurhalim, | Fithriady, Martini Dwi, Pusparini | Nurizal, Ismail Mohammad, Haikal | Khalifah, et al. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 2021.
- Rachmad Hidayat, and Yudha Herlambang. “Pengembangan Tata Kelola Industri Kecil-Menengah Di Madura.” *Jurnal Teknik Industri* 11, no. 1 (2009): 61–71. <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/ind/article/view/17211>.
- Rahmawati, Rahmawati. “Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 2 (2018): 264–283.
- Rianto, Rianto, Suherry Suherry, Dwiniati Dwiniati, and Agustina Riska Ayu. “Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kelurahan Amal Bakti Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri HILIR.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 4, no. 1 (2022): 926–948.
- Ridayanti, I. “Visi Dan Aksi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pembinaan Ekonomi Usaha Kecil Menengah Di Kota Palangka Raya” (2018). [http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/1502%0Ahttp://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1502/1/Skripsi Isma Ridayanti - 1402120289.pdf](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/1502%0Ahttp://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1502/1/Skripsi%20Isma%20Ridayanti%201402120289.pdf).
- Rizal, Saepul, and Agung Nurrahman. “PEMERINTAHAN DALAM ISLAM(Telaah Buku Fikrotul Idari Fiil IslamKarya Muhammad Nasyir).” *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 11, no. 2 (2021): 231–239. <http://scholar.google.co.id/>.
- Rumantyo, Bagus. “Analisis Peran Industri Kecil Dan Menengah Terhadap Pengentasan Pengangguran Terbuka Di Kota Malang” (2021).
- Singka, Fachry Noviar, Nurmala K. Panjaitan, and Tjahja Muhandri. “Usaha Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Berbasis Komunitas Lokal.” *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah* 9, no. 2 (2014): 158–169.

- Soendari, Tjutju. "Batasan" (n.d.).
- Solihah, Ratnia. "Perihal Pemerintah Dan Yang Diperintah." *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (2019): 1–63.
- Studi, Program, Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi, Dosen Pembimbing, and Siti Masrohatin. "KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PEMBERDAYAAN PRODUK INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) BATIK TULIS DI DESA TAMPO KECAMATAN CLURING SKRIPSI Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S" (2019).
- Suyadi, Syahdanur, and Susie Suryani. "Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Bengkalis Riau." *Jurnal Ekonomi KIAM* 29, no. 1 (2018): 1–10.
- Syaparuddin. "Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Berbagai Permasalahan Sosial-Ekonomi." *Muqtasid* 1, no. 1 (2010): 1–19.
- Thahir, Baharuddin. "Kebijakan Sosial Dan Otonomi Daerah." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* (2019): 1–12.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008," no. 1 (2008).
- UUD RI. "Undang - Undang RI Nomor 34 Tahun 2017" 6 (2017): 5–9.
- Waluya, Bagja. "Industri Hulu Dan Industri Hilir." *Jurnal Pendidikan Geografi* m (2012): 1–3. http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197210242001121-BAGJA_WALUYA/GEOGRAFI_EKONOMI/Industri_hulu_%26_hilir.pdf.
- Willar, Meisita Marhani, Agustinus B.Pati, and Sofia E. Pengemnaan. "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia Di Desa Kecaatan Maesa Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/download/36213/33720>.
- "Badan Pusat Statistik." Accessed February 25, 2023. <https://www.bps.go.id/subject/170/industri-mikro-dan-kecil.html>.
- "Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung." Accessed January 27, 2023. <https://lampung.bps.go.id/indicator/12/45/1/jumlah>

penduduk.html.

“Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.” Accessed January 27, 2023.

<https://lampung.bps.go.id/statictable/2016/02/10/411/jumlah-mahasiswa-universitas-lampung-menurut-fakultas-tahun-2010-2014.html>.

“Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya - Ardiansyah Putra Hrp, S.Pd., M.Si., Dwi Saraswati, S.Pd., M.Si. - Google Buku.” Accessed January 10, 2023.

<https://books.google.co.id/books?id=TeHODwAAQBAJ&pg=PA3&lpg=PA3&dq=Perusahaan+yang+bergerak+dalam+dunia+bisnis+terdiri+dari+beragam+perusahaan+dan+bergerak+dalam+berbagai+bidang+usaha,+mulai+dari+usaha+perdagangan,+industri,+pertanian,+manufaktur,+peternakan,+perumahan,+keuangan+dan+usaha-usaha+lainnya&source=bl&ots=tbERgfLYTn&sig=ACfU3U3DkBkp0FqY249E6vYO8oaZ5xTBbA&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjOqciHw738AhXS7HMBHUsWAUwQ6AF6BAGcEAM#v=onepage&q=Perusahaan yang bergerak dalam dunia bisnis terdiri dari beragam perusahaan dan bergerak dalam berbagai bidang usaha%2C mulai dari usaha perdagangan%2C industri%2C pertanian%2C manufaktur%2C peternakan%2C perumahan%2C keuangan dan usaha-usaha lainnya&f=false>.

“Data Peserta Didik Prov. Lampung - Dapodikdasmen.” Accessed January 27, 2023. <https://dapo.kemdikbud.go.id/pd/1/120000>.

“Ekonomi Islam / Ditulis Oleh Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” Accessed April 2, 2023.

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=342094>.

“Gallery SIKaM - Tentang Kami.” Accessed March 13, 2023. <https://gallery-ikm.disperindag.lampungprov.go.id/about>.

“Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer / Peter Salim, Yenny Salim | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” Accessed February 25, 2023.

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=283009>.

“Kemenperin: Kemenperin Pacu Pertumbuhan IKM Untuk Menjadi Tulang Punggung Perekonomian Nasional.” Accessed February 25, 2023.

<https://kemenperin.go.id/artikel/21335/Kemenperin-Pacu->

Pertumbuhan-IKM-untuk-Menjadi-Tulang-Punggung-Perekonomian-Nasional.

- “Kemenperin: Kemenperin Pacu Pertumbuhan Industri Hulu.” Accessed February 25, 2023. <https://kemenperin.go.id/artikel/4141/Kemenperin-Pacu-Pertumbuhan-Industri-Hulu>.
- “Kitab Tauhid / Shaleh Bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzan ; Penerjemah, Agus Hasan Bashori | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” Accessed March 13, 2023. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=528946>.
- “Kitab Tauhid / Shalih Bin Fauzan Al-Fauzan ; Alih Bahasa, Syahirul Alim Al-Adib ; Editor, Tim Editor Ummul Qura | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” Accessed March 13, 2023. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=998872>.
- “Manajemen Sumber Daya Manusia / Sondang. P Siagian, | Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau.” Accessed March 8, 2023. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=22333>.
- “Pengantar Ekonomi Islam / Oleh, Jaharuddin, Bambang Sutrisno | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” Accessed April 2, 2023. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1193566>.
- “Peranan Negara Dalam Perekonomian (Perspektif Islam) -Part 1-.” Accessed January 10, 2023. <https://www.iaei-pusat.org/article/ekonomi-syariah/peranan-negara-dalam-perekonomian-perspektif-islam-part-1-1?language=id>.
- “Perintah Untuk Saling Menolong Dalam Mewujudkan Kebaikan Dan Ketakwaan | Almanhaj.” Accessed March 13, 2023. <https://almanhaj.or.id/22803-perintah-untuk-saling-menolong-dalam-mewujudkan-kebaikan-dan-ketakwaan-2.html>.
- “Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi / David Berry; Penerjemah, Paulus Wirutomo | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” Accessed February 3, 2023. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=33651>.
- “Profil Provinsi Lampung: Sejarah, Geografis, Demografis, & Peta.” Accessed January 26, 2023. <https://tirto.id/profil-provinsi-lampung-sejarah-geografis-demografis-peta-gz4B>.
- “Provinsi Lampung | BPK Perwakilan Provinsi LAMPUNG.” Accessed January 26, 2023. <https://lampung.bpk.go.id/provinsi-lampung/>.
- “RESENSI BUKU ‘BANK DAN LEMBAGA KEUNGAN

- LAINNYA’ – KISAH DARI BALIK LENZA.” Accessed January 10, 2023. <https://hakikatkebahagiaan.wordpress.com/2013/07/06/resensi-buku-bank-dan-lembaga-keungan-lainnya/>.
- “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam - Gramedia Literasi.” Accessed January 10, 2023. <https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-pemikiran-ekonomi-islam/>.
- “Situs Resmi BPKP 2023.” Accessed January 26, 2023. <https://www.bpkp.go.id/lampung/konten/131/>.
- “Struktur Organisasi - Dinas Perindag Provinsi Lampung.” Accessed February 2, 2023. <https://disperindag.lampungprov.go.id/pages/struktur-organisasi>.
- “Tentang Kami - Dinas Perindag Provinsi Lampung.” Accessed November 21, 2022. <https://disperindag.lampungprov.go.id/pages/tentang-kami>.
- “Tentang Kami - Dinas Perindag Provinsi Lampung.” Accessed January 27, 2023. <https://disperindag.lampungprov.go.id/pages/tentang-kami>.
- “Teori Wawancara Psikodignostik - Fandi Rosi Sarwo Edi - Google Buku.” Accessed November 21, 2022. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=uS96DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pengertian+wawancara+menurut+para+ahli&ots=zIVeqPzb7j&sig=0BvSMeQym686Wbhk-E4GGgcRe0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- “The Essence of Humans as Social Beings – Faculty of Adab and Humanities.” Accessed February 25, 2023. <https://adab.radenfatah.ac.id/main/index.php/2018/07/28/esensi-manusia-sebagai-makhluk-sosial/>.